

Info



Kadin

www.kadin-indonesia.or.id

www.indonesia-chamber.or.id



Diterbitkan oleh Sekretariat Kadin Indonesia. Menara Kadin Indonesia Lt 29,
 Jl. HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950 Telp. (+62-21) 5274484 – 85 Fax. (+62-21) 5274331 – 32
 e-mail: infokadin@kadin-indonesia.or.id

PENGANTAR

Daftar Isi

- Kadin Indonesia Siap Mengajukan Judicial Review UUPT.....hlm. 1
- Rapat Ketahanan Pangan di Istana....hlm. 2
- Kerjasama Pengusaha-Petani Kembangkan Desa Budaya Kertalangu.....hlm.3
- China cabut larangan Impor Ikan dari Indonesia.....hlm. 5
- Industri Tekstil Dalam Negeri Tertekan.....hlm. 6
- Indonesia – Qatar Dirikan Usaha Patungan.....hlm.7
- Peraturan.....hlm. 7
- Pameran, Seminar, Konvensi.....hlm. 8
- Galeri Foto.....hlm. 8

AGENDA KADIN INDONESIA

Tanggal	Acara	Tempat
18 Februari	Bisnis Forum Indonesia - Finlandia	Grand Hyatt, Jakarta
20 Februari	Roundtable Discussion Asosiasi Auditor Internal	Mulia Hotel, Jakarta
23 Feb – 2 Maret	Furniture Indonesia ke-9	JCC, Jakarta
7-11 Maret	IFFINA 2008	JIExpo, Kemayoran
23 Maret	AGRINEX 2008	JCC, Jakarta

ANEKA KEGIATAN

Kadin Indonesia Siap Mengajukan Judicial Review UUPT

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) siap mengajukan *judicial review* atas Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang tidak sesuai dengan ketetapan dunia usaha.

"Kadin bahkan bersedia lakukan *judicial review* dari UUPT yang tidak sesuai dengan ketetapan usaha di dalam dan luar negeri," kata Ketua Umum Kadin Mohamad S Hidayat di Jakarta, Selasa.

Hidayat mengatakan, secara umum ketentuan baru dalam UUPT memberikan kemajuan yang cukup berarti. Namun, khusus ketentuan dalam pasal 74 UUPT masih memerlukan penjelasan dalam peraturan pemerintah yang dapat tetap menjamin iklim investasi yang sehat.

Keempat ayat dalam pasal tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR), ujarnya.

Namun, dia mengatakan, konsep awal yang diajukan pemerintah tidak memuat pasal 74 tersebut, bahkan saat dengar pendapat dengan Kadin dan para pemangku kepentingan lain, materi pasal 74 UUPT belum ada.

Dia mengatakan, 28 asosiasi pengusaha termasuk Kadin dan Apindo merasa keberatan terhadap RUU PT tersebut. Ketentuan dari pasal tersebut mengandung makna, mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan mencakup pemenuhan peraturan perundangan terkait, penyediaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan kewajiban melaporkannya.

Namun, Hidayat mengatakan, lingkup dan pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimaksud pasal 74 UUPT berbeda dengan lingkup dan pengertian CSR dalam pustaka maupun definisi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga internasional Bank Dunia. Diperkirakan

konsep standar CSR yang sedang digodok oleh "International Organization for Standardization" (ILO) akan selesai pada 2009.

Tanggung jawab sosial didefinisikan sebagai tanggung jawab sebuah organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku transparan dan etis, konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memerhatikan harapan dari para pemangku kepentingan, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional, dan terintegrasi di seluruh organisasi.

Dari definisi itu, ada tujuh isu inti tanggung jawab sosial, yaitu lingkungan, hak asasi manusia, praktik perburuhan, pemberdayaan masyarakat, "organizational governance", isu konsumen, dan praktik kegiatan bisnis yang sehat.

Namun Hidayat mengatakan, ada inkonsistensi antara pasal 1 dengan pasal 74 serta penjelasan pasal 74 sendiri, dimana pada pasal 1 UUPM memuat tentang komitmen PT untuk berperan serta. Sedangkan pada pasal 74 ayat 1 memuat tentang wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Dia mengatakan, di pasal 1 UUPM CSR bersifat sukarela, tetapi di pasal 74 bersifat kewajiban. Sedangkan pada penjelasan pasal 74 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perseroan adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Berikutnya, dia mengatakan, perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi sumber daya alam.

Dengan demikian, menurut Hidayat, jelas tidak ada satupun PT yang tidak berkaitan atau tidak memanfaatkan sumber daya alam.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan, Rachmat Gobel mengatakan, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Kadin, MS Hidayat, terkait dengan CSR.

Rachmat menilai CSR lebih seperti zakat yang tidak wajib hukumnya. Hal tersebut dapat menjadi beban, sehingga perlu ada aturan jelas sehingga terkendali dan implementasi dapat

sesuai dengan aturan dan tidak membebani perusahaan.

Dia mengatakan, dengan aturan yang tidak jelas banyak orang yang hendak berinvestasi tidak terealisasi. Yang perlu diantisipasi, menurut dia, adalah perusahaan yang sudah untung besar tetapi justru melarikan diri dan tidak melaksanakan CSR.

Selain itu, dia juga mengatakan, perlu ada kejelasan dalam pelaksanaan arah CSR, seperti pendidikan misalnya. CSR perusahaan yang berdampak lingkungan harus dipisahkan dari perusahaan yang tidak memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan.

"CSR itu zakat, CSR bagian dari ibadah. Kita membangun industri bukan membangun pabrik, dimana kita membangun masyarakat," ujarnya.

Rapat Ketahanan Pangan di Istana

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu sore, mengadakan rapat dengan sejumlah pengusaha Indonesia yang bergerak di sektor pangan untuk membicarakan persoalan harga pangan dan kebutuhan pokok yang terus bergejolak.

Bertempat di Istana Negara, sekitar 30 Ketua Asosiasi Pangan duduk bersama dengan sejumlah menteri kabinet dan para anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Dalam acara yang juga dihadiri wakil presiden Jusuf Kalla itu, Presiden Yudhoyono dalam pembukaan rapat mengatakan bahwa acara silaturahmi dan diskusi itu diharapkan dapat menjelaskan persoalan harga dan stok pangan yang belakangan ini terus bermasalah.

Ketua Kadin MS Hidayat sebelum rapat itu menjelaskan bahwa para pengusaha akan mengusulkan kepada pemerintah untuk memanfaatkan jaringan bulog untuk menyangga harga panen petani sehingga bisa mendorong petani untuk berproduksi di tiga tanaman pokok, yaitu beras, jagung dan kedelai.

Kadin, lanjut dia, juga akan mengusulkan agar para petani yang menanam tanaman bahan pokok itu diberi pupuk gratis, subsidi bibit serta kemudahan akses untuk mendapatkan kredit dari bank.

"Pemerintah juga harus memberikan akses pada investor yang akan menanam modal di usaha kebutuhan pokok di daerah-daerah

pertanian yang bisa dibuka namun diberi target produksi," katanya.

Sejumlah menteri yang hadir antara lain, Meko Perekonomian Budiono, Menkeu Sri Mulyani, Meko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Mendagri Mardiyanto, Mendag Mari Pangestu, Menkop UKM Suryadarma Ali, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dan Meneg BUMN Sofyan Djalil.

Selain itu hadir pula Kepala BPS Rusman Heryawan, Dirut BRI Sofyan Basyir, Dirut Pertamina Ari Soemarno, Kepala Bulog Mustafa Abubakar, Gubernur Jatim Iman Utomo, Gubernur Jateng Ali Mufiz, Gubernur Jabar Danny Setiawan dan Gubernur DKI Fauzi Bowo serta Kapolri Jenderal Polisi Sutanto.

Catatan Akhir Tahun Kadin Indonesia

Kadin Indonesia memberikan banyak catatan kepada pemerintah mengenai kondisi terakhir perekonomian nasional.

Catatan ini merupakan evaluasi dan input kepada pemerintah agar mampu memberikan arah dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi di tahun 2008 ini.

Ketua Umum Kadin Indonesia Mohamad S Hidayat, dalam kesempatan ini (Rabu, 19/12), memaparkan bahwa, kestabilan makro-ekonomi cukup terjaga dengan kecenderungan membaik, yang antara lain tercermin dari nilai tukar rupiah yang relatif tidak bergejolak.

"Kinerja neraca pembayaran juga membaik dan bermuara pada meningkatnya secara signifikan cadangan devisa," katanya.

Namun, di sisi lain, Kadin masih mencatat adanya semacam disconnect atau decoupling antara sektor finansial dan sektor riil, termasuk di antaranya sektor tradable.

Pola pertumbuhan sektoral selama lima tahun terakhir, misalnya, masih menunjukkan kesenjangan yang cenderung lebar, yakni antara sektor tradable (seperti industri manufaktur dan pertanian) dan nontradable (seperti properti, telekomunikasi, dan jasa-jasa lainnya).

Sektor tradable tumbuh relatif lamban. Sesudah krisis tahun 1997, sektor industri manufaktur hanya meningkat dengan laju satu digit, jauh dibanding dua digit yang tercapai pada era sebelum krisis.

Sistem insentif yang salah menjadikan sektor industri manufaktur dan pertanian kurang berkembang. Kredit perbankan, misalnya, lebih mengarah ke sektor nontradable yang memberi return lebih tinggi.

Padahal, seperti dituturkan oleh Anton Gunawan (Tim Ekonomi Kadin Indonesia) bahwa sektor tradable sebenarnya harus mendapat prioritas karena peranannya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Ini menjadi relevan bila menimbang angka pengangguran Indonesia yang mencapai 10,55 juta orang pada awal tahun 2007.

Kadin sebenarnya sudah sejak akhir Oktober lalu menyampaikan gejala ini, yakni ketika memberikan tinjauan atas kinerja ekonomi selama tiga tahun periode pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Dua kesenjangan ini, yakni antara sektor tradable versus nontradable serta sektor finansial vs sektor riil ini akan makin menyulitkan pemacuan lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki ketimpangan pendapatan.

Ketua Tim Ekonomi Kadin, Faisal Basri, menyebutkan, kontrasnya pola pertumbuhan sektor tradable dan nontradable cenderung menekan kehidupan di Jawa, yakni untuk penduduk berpendapatan rendah. Ini karena sebagian besar industri manufaktur berlokasi di Jawa.

Tekanan ini makin diperberat dengan masih tertekannya pertumbuhan subsektor pertanian pangan. Padahal, subsektor ini merupakan penyumbang terbesar sektor pertanian di Jawa. Sebaliknya, penduduk berpendapatan tinggi yang hidup dari jasa-jasa modern dan mayoritas berada di kota-kota besar di Pulau Jawa, menikmati pertumbuhan relatif tinggi.

Dalam kaitannya dengan gambaran perekonomian Indonesia tadi, Kadin Indonesia memberikan delapan rekomendasi kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

1. Mengimplementasikan program revitalisasi pertanian dan pedesaan.
2. Mengintegrasikan kebijakan pertanian, industri, dan energi nasional, sehingga tercipta suatu sinergi dalam mengoptimalkan segala potensi yang kita miliki.

3. Menghilangkan segala hambatan yang membuat produksi dalam negeri kian tersisih di pasar domestik.
4. Mengamankan target *lifting* minyak mentah agar tekanan defisit APBN bisa diminimalisasikan; seraya mendorong diversifikasi energi, terutama meningkatkan penggunaan energi yang terbarukan.
5. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan serta perbaikan kondisi infrastruktur di luar Jawa.
6. Menetapkan regulasi ruang lingkup dan koordinasi pemerintah tentang logistic (siapa yang mengkoordinir) agar mampu mendukung supply chain dari sektor-sektor yang export oriented dan agar dapat terintegrasi dengan sistem produksi global.
7. Memperdalam fixed capital formation, yakni dengan meningkatkan secara signifikan porsi investasi dalam bentuk permesinan.
8. Kedelapan, usaha mikro kecil menengah (UMKM) harus diposisikan sebagai pelaku ekonomi pembangunan nasional untuk menciptakan industri pendukung/penunjang pertumbuhan industri nasional. Pada waktu bersamaan, pemerintah dituntut meningkatkan akses UMKM terhadap kredit dan instrumen pembiayaan lainnya. Mengimplementasikan program revitalisasi pertanian dan pedesaan.

INKINDO: Pemerintah Sebaiknya Atur Kembali Tender Konsultan

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) meminta pemerintah mengatur kembali tender konsultan dengan membaginya sesuai kelas besar, menengah dan kecil.

Konsultan kecil harus langsung bersaing dengan konsultan kelas besar. Apalagi terkadang konsultan kelas besar juga merambah proyek-proyek konsultansi kelas kecil atau menengah di daerah. Tidak heran kemudian banyak konsultan kecil di daerah mati (gugur), karena tidak mampu bersaing.

Menurut Bachder (Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo), kenyataan di lapangan selama ini menunjukkan bahwa tidak

adanya segmen tersebut mengakibatkan konsultan kelas kecil dan menengah di daerah-daerah sangat dirugikan dan merasa tidak terlindungi.

Bachder mengatakan, DPN INKINDO, mewakili anggotanya yang berjumlah 6.800 perusahaan, sekitar 70 persen merupakan konsultan kecil. Melalui segmentasi diharapkan tercapai iklim usaha jasa konsultansi nasional yang stabil dan kondusif, serta handal. Segmentasi diperlukan agar saat bertarung dengan pelaku yang sama akan membuat profesional. Lalu setelah itu, dia bisa naik lagi golongannya, karena sudah waktunya, dari sisi pengalaman, kapasitas, peralatan, tenaga kerja, ujanrya.

Sementara Sekretaris Umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo, Laksmo Imawanto mengatakan, sudah saatnya pemerintah mengatur soal segmentasi ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau Keppres agar industri jasa konsultan nasional tumbuh dan berkembang.

KADIN DAERAH

Kerjasama Pengusaha-Petani Kembangkan Desa Budaya Kertalangu

Keterpaduan pengusaha dan petani telah mampu mengembangkan Desa Budaya Kertalangu, Denpasar Timur, dengan memanfaatkan lahan seluas 70 hektar yang mulai banyak diminati wisatawan asing maupun domestic.

Pengembangan desa budaya itu sekaligus untuk meningkatkan meningkatkan kualitas produksi pertanian, menjaga kehijauan sawah dan lebih memberdayakan masyarakat sekitarnya.

"Rintisan itu telah dilakukan sejak dua tahun lalu dan upaya pemberdayaan masyarakat dapat direalisasikan, selain masyarakat tani memperoleh persentase dari keuntungan usaha," kata Kepala Desa Kertalangu, Denpasar Timur, I Wayan Warka di Denpasar.

Hamparan lahan pertanian di pinggiran kota Denpasar tersebut tetap menjadi milik masing-masing petani sebanyak 204 orang, dan pengusaha mengembangkan unit industri kecil serta kerajinan rumah tangga di sela-sela hamparan lahan.

Unit usaha pembuatan lilin, keramik, ukiran dan jenis kerajinan lainnya telah mampu

menampung sekitar 300 tenaga kerja, selain yang bekerja pada usaha kepariwisataan, seperti restoran, toko cinderamata dan lainnya.

Hampan lahan pertanian ditata sedemikian rupa untuk tempat rekreasi yang murah dan meriah, mengantisipasi semakin berkurangnya ruang terbuka bagi keperluan rekreasi.

Rintisan pengusaha dan petani di Desa Kertalangu mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Denpasar serta pembinaan dari DISIMP, sebuah proyek irigasi Departemen Pekerjaan Umum bersama perusahaan Jepang Nippon Koei sebagai konsultan.

Proyek tersebut membantu dalam bidang pengembangan tanaman padi menggunakan sistem intensifikasi SRI (system of rice intensification) yang baru menjangkau sebagian dari rencana sekitar 80 hektar.

Selain itu mengembangkan mina padi yang hasilnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kolam pemancingan. Sekali mengadakan lomba memancing membutuhkan sekitar 500 kg ikan. Kebutuhan ikan itu selama ini didatangkan dari Jawa dengan harga Rp20.000 per kilogram.

Jika kebutuhan ikan yang cukup banyak itu bisa dipenuhi dari hasil mina padi setempat, secara langsung akan mampu meningkatkan pendapatan petani, ujar I Wayan Warka.

PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

Pemerintah Harus Agresif

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah lebih agresif membuat kebijakan yang mendukung daya saing industri nasional di tengah perlambatan ekonomi yang melanda dunia tahun ini.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan, Rachmat Gobel, di Jakarta, Selasa, mengharapkan pemerintah tidak dihantui kondisi pesimis yang berkembang saat ini akibat perkembangan ekonomi global yang cenderung negatif.

"Peluang Indonesia masih sangat besar di pasar global, asalkan ada upaya memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintah dengan potensi dunia usaha," ujarnya.

Diakuinya, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia akan membuat persaingan memperebutkan pasar internasional maupun domestik semakin ketat.

Sementara ia menilai struktur ekspor Indonesia masih sangat lemah. Setidaknya hal itu terlihat dari kinerja ekspor non migas nasional yang masih bertumpu pada komoditas primer.

"Tahun 2007 ekspor non migas nasional memang tumbuh sekitar 15,51 persen, namun sebagian besar pertumbuhan itu lebih banyak berasal dari meningkatnya harga komoditas pertanian di pasar dunia," katanya.

Pada 2007 ekspor subsektor lemak dan minyak nabati, misalnya, tumbuh 68,5 persen dari 6,069 miliar dolar AS pada 2006 menjadi 10,231 miliar dolar AS.

Sedangkan, sektor manufaktur seperti mesin dan peralatan listrik, mesin-mesin/pesawat mekanik relatif tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Ekspor mesin dan peralatan listrik hanya tumbuh sekitar dua persen dari 7,291 miliar dolar AS pada 2006 menjadi 7,436 miliar dolar AS pada 2007. Demikian pula ekspor mesin-mesin/pesawat mekanik hanya tumbuh 7,45 persen dari 4,362 miliar dolar AS pada 2006 menjadi 4,687 miliar pada 2007.

"Persaingan pasar ekspor akan semakin ketat. Indonesia yang memiliki potensi pasar yang besar pasti menjadi incaran pula, karena itu harus dijaga dari serbuan produk impor baik legal maupun illegal agar perekonomian nasional bisa bertahan," kata Rachmat.

Ia mengkritisi angka impor non migas yang mencapai 24,75 persen, atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor non migas pada 2007. Ia khawatir impor tersebut kebanyakan berasal dari barang konsumsi yang membuktikan adanya serbuan produk impor ke Indonesia.

China Cabut Larangan Impor Ikan dari Indonesia

Pemerintah China akhirnya mencabut larangan impor sementara atas produk perikanan asal RI secara resmi pada 3 Februari setelah badan karantina setempat memastikan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan produk tersebut. Dirjen Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) Departemen Kelautan dan Perikanan Martani Huseini menyatakan pihaknya telah menerima pemberitahuan kemarin dari KBRI di Beijing.

Badan Karantina China, Administration of Quarantine, Supervision, and Inspection Quality

(AQSIQ), lanjutnya, menyatakan pencabutan itu setelah melakukan inspeksi ke unit pengolahan produk perikanan nasional pekan lalu.

"Kami baru saja menerima kabar dari AQSIQ lewat KBRI Beijing tentang pencabutan larangan sementara impor perikanan dari RI. Ini merupakan tindak lanjut konsultasi bilateral dan hasil kunjungan AQSIQ pekan lalu," katanya kemarin. Dengan pencabutan tersebut, pelarangan impor sementara oleh China atas produk perikanan RI yang diberlakukan sejak 2 Agustus 2007 telah diselesaikan, sehingga komoditas tersebut bisa masuk ke pasar China.

Embargo sementara atas produk perikanan nasional yang diberlakukan China sejak 3 Agustus 2007 menyebabkan ekspor komoditas itu sempat terhenti. Pelarangan itu dilakukan karena China tidak percaya terhadap kualitas produk asal Indonesia.

China juga menemukan ekspor komoditas perikanan RI dari perusahaan yang tidak terdaftar mencapai sekitar US\$100 juta. Selain itu, China juga melaporkan sejumlah kasus kontaminasi residu dan antibiotik pada produk-produk tersebut.

Meski demikian, dampak negatif kasus tidak berkepanjangan karena eksportir perikanan nasional masih dapat memperdagangkan produknya, terutama ikan olahan, kerapu hidup dan lobster ke kawasan itu melalui pintu masuk Hong Kong dan Korea Selatan.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, kini DKP mewajibkan seluruh eksportir produk perikanan terdaftar dan memiliki HC yang diterbitkan secara resmi oleh Ditjen P2HP DKP sebagai pemegang otoritas.

GAFEKSI Siapkan Standarisasi Untuk Eksportir

Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSI) akan menyiapkan standarisasi para eksportirnya sesuai dengan standar UE untuk memenuhi kemauan pasar Uni Eropa (UE). Hal ini guna mengantisipasi agar para eksportir tidak mengalami kebijakan isolasi Eropa seperti halnya larangan terbang untuk pesawat Indonesia saat ini.

Untuk keperluan ini, GAFEKSI akan melibatkan tim dari Komisi Uni Eropa dan Badan Standardisasi Nasional (BSN). "Diharapkan ada ada kelancaran ekspor, sehingga tidak sampai ada

larangan masuk barang-barang eksportir kami nantinya," kata Sekretaris Jenderal Gafeksi Parlagutan Silitonga di Jakarta beberapa waktu lalu.

Korindo Investasi US\$ 40 Juta untuk Perakitan Bus di RI

PT Korindo Heavy Industry selaku perakitan truk dan bus Hyundai tengah melakukan investasi sebesar US\$ 40 juta di Indonesia. Investasi itu untuk pabrik perakitan chassis truk dan bus dengan kapasitas 10.000 unit per tahun, serta pabrik karoseri bus dengan kapasitas 1.500 unit per tahun. Keduanya menggunakan teknologi termmodern, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 600 orang, serta pabrik Casting & Forging.

Pada saat ini tingkat kandungan lokal dari Truck Hyundai kurang dari 20%, di tahun ini sedang diupayakan untuk menaikkan kandungan lokal sampai dengan 40%, antara lain Rear Axle, Brake System, Clutch System, Chassis, dan komponen lain-lainnya. Dalam kurun waktu 4 tahun ke depan, Korindo akan membangun 90 dealer di seluruh Indonesia, 53 di antaranya akan diselesaikan pada tahun 2008 ini.

Sejak diluncurkannya, Hyundai HD Mighty pada bulan Juni 2007 lalu hingga bulan Desember 2007, Hyundai HD Mighty atau lebih dikenal dengan nama si raksasa biru mampu terjual sebanyak 1.132 unit. Konsumen pembeli Hyundai diantaranya PPD dan Mayasari.

Industri Tekstil Dalam Negeri Tertekan

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan sepanjang 2007 impor tekstil legal maupun ilegal melonjak hingga 72,55 persen dan 69,35 persen sehingga menekan pangsa pasar produk lokal.

"Situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan," kata Ketua Umum API Benny Soetrisno, di acara pemaparan kinerja industri TPT 2007 dan proyeksi 2008, di Jakarta, Rabu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor tekstil 2007 melonjak hingga 72,55 persen dari 51.000 ton menjadi 88.000 ton.

Sementara itu, API mengungkapkan impor tekstil ilegal juga melonjak hingga 69,35 persen dibanding 2006, yaitu dari 509.000 ton menjadi 862.000 ton senilai 4,74 miliar dolar AS atau tertinggi selama lima tahun terakhir.

Masuknya tekstil impor sebanyak 950.000 ton selama 2007, telah menekan pangsa pasar produk lokal. Berdasarkan data BPS, Departemen Perindustrian, dan Bank Indonesia yang diolah API, telah terjadi penurunan penjualan sebesar 42,9 persen pada 2007 dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 456.000 ton menjadi 270.000 ton.

Penurunan pangsa pasar domestik itu, menurut Benny, disebabkan lemahnya komitmen pemerintah dan konsumen menggunakan produksi dalam negeri serta belum berhasilnya pemerintah mencegah penyelundupan. "Penggunaan produk-produk impor masih sangat kencang meski sudah ada Keppres No.80/2003 tentang penggunaan produk dalam negeri," katanya.

Menurut dia, banyak kepentingan membuat tidak sepakat memakai barang produksi lokal. Padahal dari asosiasi, seluruh produsen bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal.

Nilai penjualan produk domestik pada 2007 hanya mencapai 1,97 miliar dolar AS dari total penjualan yang mencapai 6,71 miliar dolar AS, selisihnya diduga diserap produk impor ilegal.

Untuk itu, API mendesak Departemen Perdagangan untuk melobi pemerintah China agar membatasi ekspor produk garmen ke Indonesia atau segera menerapkan mekanisme safeguard (pengamanan perdagangan). "Kalau Indonesia mau melakukan safeguard, kita harus melakukan pemetaan [mapping] sektor industri mana yang lemah," ujarnya.

LUAR NEGERI

Indonesia-Qatar Dirikan Usaha Patungan

Pemerintah Indonesia, di awal bulan Desember tahun lalu (7/12), menandatangani perjanjian usaha patungan dengan Qatar Investment Authority (QIA). Lembaga ini merupakan wahana penanaman modal mendunia Pemerintah Qatar, untuk mendirikan perseroan di bidang investasi senilai US\$1 miliar.

Usaha patungan ini, yang akan dimiliki 15% oleh pemerintah Indonesia dan 85% oleh QIA, akan mencari peluang investasi di Indonesia di beragam sektor. Sektor ini diperkirakan terutama mencakup sumber daya alam dan prasarana,

bersama dengan proyek industri dan keuangan lain.

QIA didirikan oleh Qatar untuk memperkuat ekonomi negara tersebut dengan melakukan diversifikasi ke dalam jenis-jenis aset baru. Sebagai penanam modal berkelas dunia, QIA mematuhi disiplin keuangan dan perniagaan terketat. Ia memiliki prestasi baik menanam modal dalam jenis aset yang berbeda, termasuk surat berharga terdaftar, hak milik, aset alternatif dan modal saham swasta.

Penandatanganan perjanjian yang dilakukan eksekutif anggota dewan QIA dan wakil Departemen Keuangan Indonesia di Jakarta, hari ini, disaksikan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. "Kami gembira telah merampungkan perjanjian ini hari ini. Kemitraan kami dengan Pemerintah Indonesia memungkinkan kami bersama-sama menanam modal jangka panjang dalam ekonomi menarik Indonesia," kata Direktur Eksekutif QIA Hussain.

Menurutnya, usaha patungan ini merupakan perluasan alamiah strategi untuk semakin memfokuskan investasi di Asia, dan seperti telah diketahui merupakan peristiwa penting.

PERATURAN

Permenakertrans No.20/MEN/X/2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Menakertrans Erman Suparno menegaskan penerbitan Permenakertrans No.20/MEN/X/2007 ini untuk memberi sanksi yang lebih tegas kepada konsorsium asuransi TKI.

"Ada perubahan signifikan dalam peraturan baru ini, terutama mengenai sanksi kepada konsorsium asuransi atas hasil evaluasi tiga dan enam bulan. Misalnya, peringatan pertama, kedua, ketiga dan kemudian pencabutan izin," kata Erman. Permenakertrans yang baru, juga merevisi beberapa hal, terutama syarat-syarat klaim asuransi yang dinilai memberatkan TKI bermasalah.

PAMERAN, SEMINAR, KONVENSI

9th Furniture Indonesia 2008

Pada tanggal 23 Februari - 2 Maret 2008 akan diselenggarakan furnitures, crafts, housing &

interiors di Jakarta Convention Center (Hall A + B).

Untuk Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi penyelenggara PT. Debindomulti Adhiswasti, Jl. Tebet Timur Dalam III No. 1. Jakarta 12820. Telepon: +62 21 830 9716, Fax: +62 21 831 3073

IFFINA 2008

Pada tanggal 7-11 Maret 2008 akan digelar IFFINA, expo industri furniture di JIExpo (Jakarta International Expo-Kemayoran). Informasi lebih lengkap dapat menghubungi penyelenggara PT. Kerabat Dyan Utama Jl. Kemiri No. 2, Jakarta 10350. Telepon : +62 21 392 6867, Fax: +62 21 392 6092.

SRIWIJAYA FAIR, 15-21 Mei 2008

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan SRIWIJAYA FAIR 2008 di lokasi Benteng Kuto Besak dan Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan.

Informasi lebih lengkap hubungi P.T. Antheus Indonesia.Jl. K.S. Tubun Raya No.19 Jakarta. Phone: + 62 21 5303 111, Fax: +62 21 5303113. Email: rosa@antheus.co.id;info@sriwijayafair.com

GALERI FOTO

Perayaan Natal, Hotel Aryaduta. Jakarta, 17 Desember 2008



APEC Business Advisory Council (ABAC) 1st Meeting, 21-23 Januari 2008. Jakarta.



Seminar Persaingan Usaha. Kadin Indonesia, 19 November 2007



Dyviacom
IT Infrastructure & Connection

Diterbitkan oleh: Sekretariat Kadin Indonesia. **Pelindung:** M.S.Hidayat (*Ketua Umum Kadin Indonesia*) Adi Putra Tahir (*Wakil Ketua Umum Keorganisasian dan Keanggotaan*) **Penanggung Jawab:** Hariadi Saptadji,

Dewan Redaksi: Para Direktur dan Kepala Biro Kadin Indonesia

Pemimpin Redaksi: Sutrisno ; **Wakil Pemimpin Redaksi/ Pelaksana Teknis:** Hadi Widianto. Telp: 5274484 ext.111

Kontributor: Miftahul Hakim, Ruwiyati Sri Rahayu, Nursyamsi Gemawaty